

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pembahasan dari bab ini adalah kesimpulan dan saran yang merujuk pada jawaban-jawaban permasalahan penelitian yang telah dikaji. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Sudan merupakan negara yang berada di Afrika Timur, Sudan terdiri dari 25 negara bagian. Pada tahun 1956 Sudan merdeka atas bantuan Mesir dan Inggris tetapi dengan kemerdekaan Sudan wilayahnya sendiri masih ada konflik seperti terjadinya perang saudara antara Sudan Selatan dan Sudan Utara. Hal tersebut terjadi karena adanya hukum syariat Islam yang diterapkan oleh Presiden Sudan, maka dari itu masyarakat Sudan Selatan tidak menyetujui adanya hukum tersebut dikarenakan masyarakat Sudan Selatan mayoritas beragama Kristen, Sudan Utara mayoritas penduduknya beragama Islam dan sangatlah maju dalam hal pendidikan, politik dan ekonomi. Konflik yang berada di Sudan merupakan konflik yang berkepanjangan karena dengan adanya konflik tersebut Sudan Selatan memisahkan diri menjadi negara Republik Sudan Selatan.

Perang saudara pertama diawali dengan terjadinya perbedaan antara Sudan Selatan dengan Sudan Utara sebenarnya berawal dari perjanjian Mesir di Sudan pada abad ke-19. Dimana warga yang berkulit hitam seringkali dijadikan budak, sehingga terjadilah perbedaan dan tidak kesetaraan antara warga Arab dengan warga kulit hitam yang kemudian diperpanjang setelah masa penjajahan Inggris dan Mesir, situasi politik berlanjut melalui transisi kekuasaan melalui pemilihan anggota parlemen. Partai-partai politik pun bermunculan. NUP (National Union Party) yang anggotanya mayoritas merupakan warga dari Sudan Utara, dan juga Liberal Party yang anggotanya mayoritas merupakan warga dari Sudan Selatan, merupakan beberapa contoh partai politik yang ikut bersaing dalam pemilihan tersebut.

Hasilnya, mayoritas parlemen diduduki oleh anggota NUP, partai politik yang begitu menerapkan ideology *anti-unionist* (berdiri sendiri, dan tidak ingin adanya integrasi dengan partai politik lainnya).

Melihat keadaan tersebut, anggota Liberal Party yang terpilih dalam parlemen berusaha mengusulkan sebuah pemerintahan federal, yang memberikan Sudan Selatan administrative yang berbeda dengan Sudan Utara. Hal tersebut merupakan upaya Sudan Selatan dalam membentuk sebuah pemerintahan yang benar-benar tidak diskriminatif, dan berusaha memperbaiki keadaan warga negara yang berada di Sudan Selatan. Usulan tersebut mendapatkan tanggapan yang positif oleh anggota parlemen lainnya, termasuk mayoritas anggota dari NUP. Namun, ternyata tanggapan positif tersebut hanya sebagai janji yang tidak mungkin terealisasi. Janji dengan harapan akan mendapatkan suara dan dukungan dari rakyat Sudan Selatan.

Sistem otonomi daerah Sudan Selatan yang dijanjikan dalam perjanjian Addis Ababa ternyata berbeda dengan yang diharapkan oleh SSLM (*Southern Sudan Liberal Movement*). Yang diharapkan oleh pihak pemberontak adalah sistem federalisme sebagai bentuk negara Sudan, dimana nantinya pemerintahan baru Sudan Selatan memiliki hak untuk mengembangkan wilayahnya sendiri, dan menentukan beberapa kebijakan khusus Sudan Selatan.

Perang sipil kedua Sudan dimulai tahun 1983, disebabkan oleh realisasi perjanjian Addis Ababa yang tidak sesuai harapan masyarakat di Sudan Selatan. Dalam penerapannya, pemerintahan pusat yang awal mulanya menjanjikan sebuah pemerintahan otonomi bagi Sudan Selatan, ternyata dilanggar. Kasus intervensi dalam pemilihan umum, serta pengabaian terhadap perkembangan sosio-ekonomi Sudan Selatan mewarnai 11 tahun penerapan perjanjian Addis Ababa. Seringkali pemerintahan pusat berencana mengakhiri perjanjian Addis Ababa. Jadi dapat disimpulkan pada perjanjian Addis Ababa bukan hanya terletak pada apakah perjanjian tersebut sudah dijalankan sesuai rencana atau tidak, tetapi juga pada

bagian apakah ada konsistensi dalam mematuhi atau menjalankan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak pada tahun 1972.

Sebuah perjanjian Addis Ababa pada saat itu memberikan harapan kepada rakyat Sudan Selatan akan perdamaian, serta perkembangan sosio-ekonomi daerah. Namun karena banyaknya pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh pemerintahan pusat di Sudan Utara, meningkatkan minat warga Sudan Selatan untuk ikut serta sebagai pasukan gerilya menentang pemerintahan pusat.

Dalam perjanjian *Naivasha*, pasukan militer dari Sudan Selatan dan Utara tetap menjadi unit militer yang terpisah satu sama lain. Langkah pertama adalah penarikan 91.000 pasukan pemerintahan dari Sudan Selatan selama dua setengah tahun, sedangkan pihak SPLA punya waktu delapan bulan untuk menarik pasukannya dari wilayah Sudan Utara. Direncanakan akan ada integrasi militer antar kedua pihak, dengan jumlah tertentu (jadi pasukan militer masing-masing pihak tidak secara langsung diintegrasikan selama enam tahun periode integrasi pemerintahan). Walaupun akan diintegrasikan, masing-masing unit militer akan berada dalam komando yang berbeda, hanya berada dalam markas yang sama. Hasil referendum 6 tahun berikutnya, jika menghasilkan persatuan, maka integrasi militer akan dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak.

Dalam perjanjian 2005, masing-masing pihak tidak diberikan obligasi untuk menghilangkan pasukan militernya. Walaupun telah menyetujui gencatan senjata, namun tetap masih ada rasa saling ketidakpercayaan antar kedua pihak. Hak untuk tetap memiliki unit militer dianggap sebagai sebuah mekanisme *check and balance*. Sepanjang jalan enam tahun setelah diberlakukannya perjanjian CPA, ada kemungkinan salah satu pihak akan melanggar isi perjanjian yang telah disepakati. Suatu saat jika perang kembali pecah, setiap pihaknya mampu untuk melindungi diri mereka masing-masing.

Referendum merupakan pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan politik. Kasus Referendum di Sudan memilih antara kemerdekaan (*Secession*) atau persatuan (*Unity*). Keputusan untuk mengadakan sebuah

referendum, merupakan salah satu perjanjian yang telah disetujui oleh kedua pihak (SPLA/M dan pemerintahan pusat Khartoum) dalam perjanjian perdamaian komprehensif tahun 2005. Referendum dilaksanakan 6 tahun pasca pengaplikasian perjanjian Naivasha, agar warga Sudan Selatan (subjek pemilih dalam referendum Sudan 2011) dapat memiliki gambaran apakah integrasi antar kedua pihak itu akan berjalan dengan lancar di masa yang akan mendatang ataupun konflik kembali berkejolak. Dalam hal ini Sudan Selatan harus berusaha untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan sebagai negara merdeka dari negara – negara lain agar dapat melakukan hubungan diplomatik. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2011 akhirnya menjadi Sudan Selatan resmi menjadi negara yang berdaulat dan berdiri sendiri dengan nama Republik Sudan Selatan dengan presiden pertama yaitu Jhon Garang.

Selain itu skripsi ini dapat dijadikan referensi bagi guru sejarah dan dapat menjadi salah satu acuan untuk mengajarkan nilai cinta tanah air, patriotisme, toleransi, nasionalisme, saling menghargai dan menghormati, serta yang utama menurut penulis adalah nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan. Cinta tanah air, jiwa patriotism dan nasionalisme ini tergambar pada perjuangan masyarakat Sudan Selatan untuk memperjuangkan hak – hak mereka dalam membebaskan diri dari Sudan. Berdasarkan kasus konflik - konflik yang ada di Sudan penulis berpenyakit bahwa hal yang membuat kehidupan ini bernilai adalah dengan menghargai perbedaan yang dimiliki oleh setiap orang. Namun hal yang paling penting adalah perdamaian dunia di mana tidak ada diskriminasi rasial seperti yang penulis kaji dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pembelajaran sejarah di lembaga persekolahan khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas karena sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD)

Humaeniah, 2013

Krisis di Sudan Perjuangan Rakyat Sudan Selatan Menuntut Kemerdekaan Tahun 1956-2011

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

“Menganalisis Perkembangan Sejarah Dunia Sejak Perang Dunia II sampai dengan Perkembangan Mutakhir” dengan Kompetensi Dasar 2.2 yaitu “Kemampuan menganalisis perkembangan mutakhir dunia atau kekinian.” Sejarah Negara Sudan Selatan merupakan hal yang mutakhir karena jika melihat proses terjadinya negara Sudan Selatan sangatlah sulit karena harus melewati berbagai macam konflik yang ada di Sudan. Oleh sebab itu melalui pembelajaran dari fakta sejarah tentang terjadinya konflik di Sudan, siswa bisa memperoleh pendidikan karakter bahwa perlakuan diskriminatif dalam kehidupan mendatang konflik yang berkepanjangan dan merugikan objek yang dijadikan perlakuan diskriminatif. Siswa juga dapat mengetahui kalau adanya diskriminatif bisa menghancurkan integrasi bangsa. Siswa dapat mengetahui Sudan sangatlah berpengaruh bagi Amerika karena dijadikan tempat persembunyian.

Humaeniah, 2013

Krisis di Sudan Perjuangan Rakyat Sudan Selatan Menuntut Kemerdekaan Tahun 1956-2011

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu